

**ORIENTASI PEMILIH PEREMPUAN TERHADAP CALON LEGISLATIF
PEREMPUAN DI DAPIL VI PADA PEMILIHAN UMUM DPRD KOTA
PEKANBARU TAHUN 2019**

Oleh : Latiffa Harisa

Email: desy_mutiasari@ymail.com

Pembimbing: Wazni

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The orientation of female voters towards female legislative candidates in electoral district VI in the 2019 Pekanbaru City DPRD general election is interesting to study. The low orientation of female voters towards female legislative candidates as well as the factors that influence the low orientation of female voters towards female legislative candidates here is voter orientation, which is the ability of voters to express their own identity and that of those around them. Women voters with voting votes often become a bone of contention in every general election (Election). In addition to being large in number, women's votes are often used as a benchmark for male voters and first-time voters. This more dominant voice is expected by each of the respective prospective candidates in election participation.

This study uses the theory of Prof. Mariam Budiarjo (2008; 136) which categorizes voter behavior into two dimensions, namely rational voter behavior and emotional voter behavior. General Election of Pekanbaru City DPRD in 2019. The research location was carried out in Pekanbaru City, to be precise in Dapil VI of Senapelan and Payung Sekaki Districts. Furthermore, data collection techniques were carried out by interviews and documentation. This research use descriptive qualitative approach.

The results of this study are the low orientation of female voters towards female legislative candidates in Dapil VI in the 2019 Pekanbaru City DPRD general election due to voter distrust in choosing female legislative candidates with the notion that female leaders make decisions using emotional rather than rational means.

Keyword : Orientation of Female Voters Towards Womana Legislative Candidates in Electoral Districts VI in 2019 Pekanbaru City DPRD General Election

PENDAHULUAN

Dalam pendekatan perilaku
pemilih, orientasi merupakan suatu

proses seseorang untuk menangkap atau mengerti keadaan sekitarnya dan ia dapat melokalisasi dirinya dalam hubungan dengan sekitarnya tersebut. Orientasi pemilih terdapat interaksi antara manusia satu dengan lainnya dan akan selalu terkait dengan pengetahuan, sikap, dan nilai seseorang kemudian memunculkan orientasi sehingga timbul budaya politik. Orientasi politik kemudian membentuk tatanan dimana interaksi-interaksi yang muncul tersebut yang dapat mempengaruhi budaya politik pemilih. Orientasi politik mencakup perhatian politik pemilih. Sesuatu yang menjadi perhatian pemilih sebagai warga negara dalam sistem politik disebut objek yang disetujui politik. Partisipasi pemilih terhadap sistem politik yang menjadi perhatiannya, baik sistem politik keseluruhan maupun salah satunya.

Terkait dengan sistem politik yang dibahas mengenai sistem politik yang lengkap, berpartisipasi dalam sistem input (yang berarti terhadap objek kebijakan dan sistem pemerintahan), dan keterlibatan dalam sistem output (yang berarti perhatian terhadap pengawasan dan hasil kebijakan). Selain itu, termasuk di dalamnya adalah semua sistem politik yang menyertakan pemilih itu sendiri. Orientasi yang dimaksudkan disini ialah orientasi pemilih, dimana kemampuan pemilih untuk mengemukakan identitas diri sendiri dan orang lain di sekitarnya.

Partisipasi politik tidak terlepas dari sudut pandang pemilihan umum yang merupakan mekanisme demokrasi. Pemilihan umum adalah cara untuk mengetahui keinginan rakyat mengenai arah dan kebijakan negara kedepan. Ada 3 macam tujuan pemilu yaitu memungkinkan peralihan pemerintahan secara aman dan tertib untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dalam rangka melaksanakan hak asasi warga negara. Pemilihan umum digunakan sebagai penentu calon pemerintah baik

itu di pusat maupun daerah dimana rakyat dapat terlibat dalam proses pemilihan calon legislatif maupun pemimpin negara cara baik yang dilakukan secara langsung umum bebas rahasia jujur adil dan aman. Pemilu di Indonesia memberikan ruang yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk menjadi wakil rakyat. Meskipun, kenyataannya dominasi laki-laki di parlemen lebih menonjol jika diukur dari jumlah keterwakilan namun peran perempuan tidak bisa dikesampingkan.

Perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan suatu bangsa. Tetapi perempuan sampai saat ini belum mendapatkan kesempatan yang lebih baik dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk di bidang politik dan pemerintahan. Perempuan masih dianggap kurang memiliki kemampuan untuk berperan lebih banyak dalam membuat berbagai kebijakan yang lebih baik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Perempuan sebagai asset bangsa yang berperan dalam proses penerusan dan penciptaan generasi yang berkualitas perlu mendapatkan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya. Keterlibatan perempuan di bidang politik adalah bagian tidak terpisahkan dalam proses demokrasi.

Pemilihan umum di provinsi Riau pun juga tidak terlewatkan dimana dari sekian banyak bakal calon legislatif hanya 44 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terpilih pada pemilihan umum 2019. Adapun keputusan KPU Pekanbaru terdapat pada Nomor : 56/HK.03.1-KPT/1471/KPU-Kota/VIII/2019 tentang penetapan calon terpilih anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kota Pekanbaru dalam pemilihan umum tahun 2019.

Berdasarkan data olahan penulis yang diperoleh dari situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dimana ada setidaknya 16 partai yang lolos dari daftar calon sementara ke daftar calon

tetap legislatif Kota Pekanbaru. Jumlah dari keseluruhan calon tetap ini adalah 691 orang. Dikutip dari data di atas bahwa yang lolos dalam tahap pencalonan masih di dominasi oleh calon laki laki sebanyak 425 orang sedangkan 266 orang calon perempuan.

Terpilihannya calon legislatif perempuan tidaklah memenuhi rekomendasi 30% kuota yang disediakan bagi politisi perempuan. Dalam UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilu yang menyebutkan pentingnya affirmative action bagi partisipasi politik perempuan dengan menetapkan kuota 30% dari seluruh calon partai politik pada parlemen di tingkat nasional maupun lokal. Terpilihannya calon legislatif perempuan menjadi salah satu hal yang menarik untuk diperbincangkan apalagi bagi kalangan politisi maupun akademisi. Namun terpilihnya calon legislatif perempuan ini menjadi penting dikarenakan terpilihnya mereka menjadi acuan sebagai negara demokrasi ini memberikan hak yang sama antara perempuan dan laki-laki. Juga disebutkan dalam kontep hukum nasional apa makna dari kesetaraan gender.

Selama ini banyak anggapan masyarakat bahwa perempuan tidak cocok untuk dapat berkiprah di dunia politik, karena perempuan dianggap lebih memakai perasaan dalam mengambil keputusan. Tingkat partisipasi pemilih yang memilih anggota dewan perempuan sangat rendah sehingga ada indikasi terjadi resistensi terhadap anggota dewan perempuan. Kondisi resisten terhadap caleg perempuan ini rupanya juga dialami oleh para pemilih dalam pemilihan umum. Resistensi pemilih terhadap pemilih perempuan terjadi tidak hanya pada pemilihan umum DPR RI saja tetapi juga pada pemilihan umum DPRD Kabupaten/Kota.

Permasalahan mengenai keterwakilan perempuan tidak hanya

terjadi ditingkat nasional tapi juga tingkat lokal. Hal ini memunculkan feminisasi dimana Pemilihan umum di Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru Kota dan Lima Puluh pada tahun 2019 jumlah perolehan suara untuk calon legislatif perempuan terpilih sangat sedikit. Jumlah ini tidak berbanding lurus dengan jumlah perempuan yang menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum. Kemungkinan rendahnya partisipasi pemilih perempuan dalam terpilihnya calon legislatif perempuan pada pemilihan umum perlu di teliti lebih lanjut.

Berdasarkan fenomena yang terdapat pada latar belakang masalah yaitu rendahnya perolehan suara yang diperoleh 32 calon legislatif perempuan Dapil VI yakni di Kecamatan Senapelan dan Payung Sekaki yang mencalonkan diri pada pemilu Kota Pekanbaru memperoleh suara yang rendahnya sehingga tidak ada perwakilan legislatif perempuan pada dapil VI yang mewakili. Berdasarkan latar belakang dan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan lebih lanjut dengan judul: "Orientasi Pemilih Perempuan Terhadap Calon Legislatif Perempuan di Dapil VI Pada Pemilihan Umum DPRD Kota Pekanbaru Tahun 2019"

Metode Penelitian

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang di temukan di lapangan. Sehingga lebih mempermudah dalam mendapatkan gambaran yang mengenai Orientasi Pemilih Perempuan Terhadap Calon Legislatif Perempuan di Dapil VI Pada Pemilihan Umum DPRD Kota Pekanbaru Tahun 2019.

Sumber data dan Jenis Data

Sumber data diperoleh dari informan dan adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data skunder sebagai berikut :

1. Data Primer, diperoleh melalui wawancara dengan narasumbernya langsung, sehingga memudahkan peneliti untuk mencari informasi mengenai orientasi pemilih perempuan terhadap calon legislatif perempuan di dapil VI pada pemilihan umum DPRD Kota Pekanbaru tahun 2019.
2. Data Sekunder, diperoleh dari media cetak, berbagai buku, dokumentasi dan catatan pribadi yang ada hubungannya dengan objek pengkaji.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di daerah pilih VI yakni Kecamatan Senapelan dan Payung Sekaki dipilih karena perolehan suara yang rendahnya sehingga tidak ada perwakilan legislatif perempuan pada dapil VI yang mewakili dibandingkan dapil lainnya.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : Wawancara, Dokumentasi memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan dan data yang relevan penelitian.

Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan adalah analisa data kualitatif, data yang penulis peroleh baik dari data primer maupun sekunder, dikembangkan dengan teknik deskriptif yaitu suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran secara rinci berdasarkan kenyataan yang ditemukan di Lapangan dan melakukan proses editing

klasifikasi data, tabulasi data dan interpretasi data yang kemudian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Orientasi Pemilih Perempuan terhadap Calon Legislatif Perempuan di Dapil IV pada Pemilihan Umum DPRD Kota Pekanbaru Tahun 2019

Budaya patriarki yang sangat dominan di Indonesia sangat membatasi peluang perempuan secara umum untuk terjun ke dalam dunia politik, atau lebih jauh lagi memegang tampuk pimpinan politik nasional. Berdasarkan budaya patriarki, dominasi kaum laki-laki dilegitimasi dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam politik.

Kota Pekanbaru merupakan kota metropolitan yang seharusnya dikota tersebut mendukung kesetaraan gender yang dapat meminimalisir budaya patriarki yang terjadi di Indonesia namun pada fenomena yang terjadi di dapil VI, banyak nya pemilih yang belum mendukung keterwakilan perempuan di bidang politik.

Kurangnya pemahaman dan pentingnya memberikan kepercayaan kepada perempuan untuk duduk di DPRD Kota Pekanbaru merupakan hal yang masih susah dipahami oleh para pemilih terkhususnya pemilih perempuan. Hal ini dibuktikan melalui serangkaian wawancara oleh peneliti dengan beberapa informan yang memilih di Dapil VI.

Putra, 2012:97 menyatakan pembuktian atas asumsi tersebut dapat dilihat dari data yang ada dalam sejarah perpolitikan Indonesia sejak dilakukannya pemilu untuk pertama kalinya pada tahun 1995 Hal itu terjadi karena masih kuatnya budaya patriarki yang dianut oleh masyarakat yang memandang perempuan makhluk yang lemah sehingga tidak pantas masuk dalam dunia politik yang begitu keras.

Menurut Alfian Rokhmansyah (2013) di bukunya yang berjudul Pengantar Gender dan Feminisme, patriarki berasal dari kata patriarkat, berarti struktur yang menempatkan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral, dan segala-galanya. Sistem patriarki yang mendominasi kebudayaan masyarakat menyebabkan adanya kesenjangan dan ketidakadilan gender yang mempengaruhi hingga ke berbagai aspek kegiatan manusia. Laki-laki memiliki peran sebagai kontrol utama di dalam masyarakat, sedangkan perempuan hanya memiliki sedikit pengaruh atau bisa dikatakan tidak memiliki hak pada wilayah-wilayah umum dalam masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, politik, dan psikologi, bahkan termasuk di dalamnya institusi pernikahan. Hal ini menyebabkan perempuan diletakkan pada posisi subordinat atau inferior. Pembatasan-pembatasan peran perempuan oleh budaya patriarki membuat perempuan menjadi terbelenggu dan mendapatkan perlakuan diskriminasi. Ketidaksetaraan antara peran laki-laki dan perempuan ini menjadi salah satu hambatan struktural yang menyebabkan individu dalam masyarakat tidak memiliki akses yang sama. Selain itu, produk dari kebijakan pemerintah yang selama ini tidak sensitif terhadap kebutuhan perempuan telah membuat perempuan sering kali menjadi korban dari kebijakan tersebut.

Sastriyani; 2009: 171 menyatakan Selama ini perempuan dikonstruksikan secara sosial dan politik agar mempunyai label-label tertentu dengan kecenderungan hanya berada pada ranah privat yang tidak berhubungan dengan dunia politik. Adanya hambatan kaum perempuan untuk terjun ke dunia politik dua kali lebih besar dibandingkan laki-laki. Kaum perempuan dituntut untuk mempunyai kualitas dan standar yang sama dengan laki-laki. Patriarkhi ini tentu akan sulit bagi perempuan untuk mencapai standar tersebut

Handayani,dkk; 2008: 11 menyatakan Kesenjangan gender atau ketidakadilan gender merupakan bentuk perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam segala bidang yang bersumber pada konstruksi sosial. Sistem budaya masyarakat Indonesia yang masih patriarki menjadi sumber terciptanya ketidakadilan gender, khususnya di bidang politik. Patriarkhi adalah konsep bahwa laki-laki memegang kekuasaan atas semua peran penting dalam masyarakat, dalam pemerintahan militer, pendidikan, industri, bisnis, perawatan kesehatan, iklan, agama, dan lain sebagainya. Hal ini mengakibatkan laki-laki yang dilambangkan lebih kuat dari pada perempuan akan mempunyai peran dan fungsi yang lebih besar.

Pemilih Rasional

Penulis melakukan wawancara ke beberapa informan yang dapat digolongkan pemilih rasional. Berdasarkan wawancara dengan Yanti yang berprofesi sebagai sales dan juga selaku pemilih di Dapil VI;

“Saya sangat mendukung adanya keterwakilan perempuan di kursi pemerintahan agar nantinya tersampaikan aspirasi ataupun suara dari kaum perempuan di pemerintahan. Adapun duduk atau tidaknya calon DPRD perempuan yang duduk di hpemerintahan, saya tetap dukung”

Keterwakilan yang dimaksud ialah pemilih perempuan memilih calon legislatif perempuan dikarenakan keterwakilan perempuan di legislatif menjadi perihal penting pemerintahan yang dimana melalui salah satu kebijakan *affirmative action* mendorong keterwakilan perempuan di legislatif (Andi Aulia Nabila,2019).

Affirmative Action yang dilakukan pemerintah merupakan salah satu cara untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam perpolitikan nasional secara kuantitatif. Keterwakilan perempuan pun juga dianggap penting dikarenakan agar tersampainya pemenuhan hak-hak perempuan di tingkat nasional maupun daerah serta menyuarakan kepentingan perempuan.

Berdasarkan wawancara dengan Ratna Sari Dei yang berprofesi sebagai sales dan juga selaku pemilih di Dapil VI;

“Alhamdulillahnya saya memilih calon DPRD perempuan karena saya ingin tersampainya suara perempuan di pemerintahan apalagi zaman sekarang sudah zaman emansipasi wanita, wajar jika wanita juga dibutuhkan di pemerintahan”

Maksud dan tujuan yaitu bagaimana partisipasi politik perempuan bermakna/transformatif dan dapat merubah agenda politik menjadi lebih membumi, serta berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Keterlibatan perempuan diharapkan dapat membawa perspektif baru dalam proses politik dan penentuan prioritas mengenai isu yang akan dibahas. Dinamika perjuangan perempuan di pemerintah harus mampu merespon isu yang berkembang di tengah masyarakat.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan sebelumnya, peneliti menemui persamaan pendapat dan tanggapan oleh pemilih perempuan atau informan selanjutnya. Wawancara dengan Yufni yang berprofesi pegawai toko dan juga selaku pemilih di Dapil VI;

“Dari beberapa calon yang saya lihat baik dari baliho maupun terpampang di TPS sebelum dan dihari pemilihan, figur yang terlihat baik calon laki-laki dan calon perempuan membuat saya

kurang meyakini dalam memilih calon DPRD perempuan saya lebih yakin calon DPRD laki-laki di karenakan laki-laki lebih tepat untuk memimpin”

Berdasarkan wawancara dengan Rofiah yang berprofesi pedagang dan juga selaku pemilih di Dapil VI;

“Dikarenakan kesibukan, saya kurang tahu tentang calon-calon DPRD yang mencalon. Apalagi untuk visi misi dari calon DPRD laki-laki maupun calon perempuan, maka saya lebih memilih kepada calon DPRD laki-laki saja”

Berdasarkan wawancara dengan Oktarini Putri Lina Sari yang berprofesi ibu rumah tangga dan juga selaku pemilih di Dapil VI;

“Karena pada saat kampanye calon laki-laki lebih mendekatkan dirinya kepada masyarakat, maka dari itu saya lebih memilih calon DPRD laki-laki”

Pendapat pemilih perempuan terhadap calon legislatif perempuan juga mendapati bahwa lebih tinggi pemilih terkhususnya pemilih perempuan memilih calon legislatif laki-laki dibandingkan calon legislatif perempuan. Hal ini dipengaruhi dari adanya budaya patriarki dan adanya feminisme dimana budaya patriarki yang membatasi kesempatan perempuan namun feminisme memperjuangkan suara perempuan. Perempuan yang dianggap hanya melakukan pekerjaan rumah sulit untuk membuka sayap di dunia politik. Hal ini disebabkan sudut pandang yang rendah terhadap calon legislatif perempuan yang hanya dilihat dari keterbatasan pendidikan, ekonomi, maupun sosial. Wilayah pekerjaan perempuan pun biasanya terbatas pada sektor informal yang rendah seperti buruh kasar atau pembantu rumah tangga.

Berdasarkan wawancara dengan Atika yang berprofesi ibu rumah tangga dan juga selaku pemilih di Dapil VI;

“Karena dari dahulunya saya selalu memilih calon DPRD laki- laki, ketidakpercayaan saya terhadap calon DPRD perempuan dikarenakan cara memimpin yang mungking secara emosional”

Selanjutnya, berdasarkan wawancara dengan Via Rina yang berprofesi ibu rumah tangga dan juga selaku pemilih di Dapil VI;

“Secara logika saja kita bisa menilai bahwa calon DPRD perempuan pasti mengemukakan emosional dibandingkan rasional, makanya saya memilih calon DPRD laki-laki karena ketidak percayaan saya terhadap calon DPRD perempuan memimpin. Menurut saya pun, memang seharusnya laki-laki yang memimpin bukan perempuan”

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas, peneliti melihat dan mencermati pemilih memilih yang pada kenyataannya mereka pun mengakui bahwa perempuan lemah dan tidak mampu bersaing dengan laki-laki di pemerintahan dalam rangka memperjuangkan aspirasi masyarakat. Kondisi demikian ini menggambarkan feminisasi yang terjadi di negara Indonesia terkhususnya di Kecamatan Senapelan dan Payung Sekaki. Berbagai alasan dapat memicu feminisasi kemiskinan yang terjadi di masyarakat, antara lain: tertanamnya ideologi gender yang membakukan peran perempuan pada sektor domestik dan laki-laki di ranah publik. Hal inilah yang membawa dampak luas bagi keterbelakangan perempuan.

Calon legislatif perempuan pun juga dilabelkan sebagai ibu rumah tangga yang tidak dapat bekerja di luar keluarganya atau di wilayah laki-laki, termasuk lembaga pemerintahan. Dalam

keluarga, pengambilan keputusan didominasi oleh kaum laki-laki, demikian juga di lingkungan masyarakat yang lebih luas. Di ranah publik, eksistensi perempuan juga kurang diperhitungkan, terbukti dengan minimnya jumlah perempuan yang menduduki posisi jabatan struktural baik di legislatif, eksekutif maupun yudikatif yang nota bene juga berperan sebagai pengambil keputusan. Inilah kenyataan yang terungkap dalam penelitian bahwa para pemilih perempuan pun meragukan kemampuan calon legislatif perempuan karena faktor kultural yang masih melekat dalam proses pemilihan. Keterlibatan perempuan dan laki-laki di bidang politik adalah bagian tidak terpisahkan dalam proses demokratisasi. Mengkaitkan isu gender dengan proses demokratisasi adalah sesuatu yang sudah lazim diterima oleh masyarakat, oleh karena di dalamnya terintegrasi hak-hak politik baik bagi laki-laki maupun perempuan yang merupakan hak asasi manusia paling mendasar. (Suharizal dan Delfina Gusman: 2010)

Pemilih Emosional

Pemilih emosional dapat dilihat dari sudut pandangannya memilih dengan melihat lingkungan sekitar dan secara sosiologisnya. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Nur Hayati yang berprofesi sebagai juru parkir dan juga selaku pemilih di Dapil VI;

“Saya kurang yakin jika yang memimpin itu perempuan karenakan hakekat yang memimpin itu laki-laki dalam ajaran agama islam. Sebaiknya perempuan itu mengikuti kodratnya mengurus rumah tangga saja”

Selanjutnya, berdasarkan wawancara peneliti dengan Putri Aulia yang berprofesi sebagai pegawai toko dan juga selaku pemilih di Dapil VI;

”Untuk saat ini saya saya lebih memilih calon DPRD laki-laki untuk jadi pemimpin karena laki-laki lebih layak untuk memimpin dari pada perempuan, sayapun tau calon-calon DPRD melalui baliho saja. Pengenalan terhadap calon DPRD perempuan menurut saya kurang saya ketahui”

Berdasarkan wawancara tersebut bahwa pada penyampaian pendapat pemilih perempuan memilih didasari ketidak yakinan dan juga ketidak layakan memimpin bagi calon legislatif perempuan. Partisipasi pemilih perempuan yang minim memilih calon pemimpin perempuan membuat pertanda bahwa adanya masalah kenegaraan. Hal ini menyebabkan rendahnya keterwakilan perempuan di pemerintahan.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Rani Maitul yang berprofesi pegawai toko dan juga selaku pemilih di Dapil VI;
“Untuk pemilihan DPRD tahun ini saya memilih calon DPRD perempuan karena dekatnya pemukiman beliau dengan saya hingga terpilihnya beliau nanti dapat membantu membangun daerah tempat saya tinggal”

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas, peneliti melihat dan mencermati pemilih memilih yang pada kenyataannya mereka memilih untuk menyalurkan aspirasi perempuan di pemerintahan. Pemilih tersebut juga mendukung adanya keterwakilan pemerintahan di kursi DPRD Kota Pekanbaru. Salah satu bentuk perwujudan demokrasi yakni dalam pemilihan umum di Indonesia yang memberikan akses dan kesempatan lebih luas kepada calon legislatif tekhususnya calon legislatif perempuan dalam memberikan suara dan hak ada di dalam dunia pemerintahan. Sehingga

hal ini juga dapat digunakan oleh semua masyarakat terkhususnya perempuan untuk ikutserta dalam pencalonan legislatif untuk memperjuangkan hak nya atas adanya diskriminasi yang bermula dari budaya patriarki.

Kenyataan dalam masyarakat Indonesia, kesetaraan dalam memperoleh manfaat yang sama dan adil dari hasil-hasil pembangunan antara laki laki dan perempuan (termasuk di dalamnya anak perempuan) belum tercapai, terutama disebabkan masih sangat kuatnya budaya patriarki dan perspektif laki-laki dalam mempengaruhi pola pikir, pola perilaku, dan pengambilan keputusan termasuk pengambilan kebijakan. Kepedulian atas kesejahteraan perempuan bermakna pada kesungguhan upaya untuk mendukung pemenuhan hal-hal yang dibutuhkan agar perempuan bisa melakukan pembangunan nasional, kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas, serta kesempatan untuk belajar menjadi bagian dari proses di dalam masyarakatnya. Kepedulian atas keterwakilanperempuan bermakna pada kesungguhan upaya untuk memastikan bahwa setiap perempuan dapat juga untuk berkembang sesuai dengan bakat yang dimilikinya.

Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Orientasi Pemilih Perempuan terhadap Calon Legislatif Perempuan di Dapil VI pada Pemilihan Umum DPRD Kota Pekanbaru Tahun 2019

Faktor- faktor yang dapat mempengaruhi rerndahnya orientasi pemilih perempuan terhadap calon legislatif perempuan di Dapil VI pada pemilihan umum DPRD Kota Pekanbaru berdasarkan informasi dari informan yang telah di wawancarai oleh peneliti adalah

1. Kurangnya keyakinan pemilih perempuan terhadap calon legislatif perempuan dikarenakan masih kentalnya budaya patriarki yang selalu hadir dalam masyarakat.
2. Masih tingginya pembagian peran serta tanggung jawab pada calon legislatif laki-laki dikarenakan kesetaraan gender yang dimana secara kultural mengacu pada peran yang dijalani oleh laki-laki dan perempuan.
3. Kurangnya pengenalan calon legislatif perempuan oleh pemilih perempuan yang masih kurang mendominasi dibandingkan pengenalan calon legislatif laki-laki.
4. Menilai dari pemikiran pemilih perempuan bahwa calon legislatif perempuan lebih mendominasi menggunakan emosional dalam mengambil kebijakan dibandingkan secara rasional atau logika.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan melalui serangkaian wawancara dengan pihak-pihak terkait dalam bab ini peneliti akan memberikan data-data dari hasil penelitian disejumlah instansi pemerintahan, diantaranya Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru, dan juga pemilih perempuan di Kota Pekanbaru, Khususnya di dapil IV yaitu terdiri dari kecamatan Senapelan dan Payung Sekaki. Maka diperoleh data tentang Orientasi Pemilih Perempuan Terhadap Calon Legislatif Perempuan di Dapil VI Pada Pemilihan Umum DPRD Kota Pekanbaru Tahun 2019.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan yaitu. Kuatnya sistem patriarki yang masih ada di Kecamatan Senapelan dan Payung Sekaki menghasilkan sebuah keputusan yang dimana hasil dari pemilihan calon legislatif terpilih dari daerah ini hanya di

wakilkkan oleh legislatif laki-laki saja. Dominasi laki-laki yang masih terjadi pada fenomena tersebut dapat dilihat bahwa masih dikuasainya perwakilan legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) oleh laki-laki. Banyaknya pemilih baik itu pemilih laki-laki dan pemilih perempuan menyumbangkan banyaknya hak suara mereka pada calon legislatif laki-laki.

Hal tersebut memberikan pandangan bahwa partisipasi dalam pemilihan calon legislatif perempuan sangatlah rendah dan dipandang sebelah mata. Berdasarkan penjelasan dan pembahasan yang telah diungkapkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dalam orientasi pemilih perempuan terhadap calon legislatif perempuan di Dapil VI pada pemilihan umum DPRD Kota Pekanbaru Tahun 2019 pada dasarnya berjalan dengan baik. Namun ada beberapa kendala yang muncul dalam partisipasi pemilih perempuan yaitu :

1. Ketidakpercayaan pemilih perempuan memilih calon legislatif perempuan.
2. Pemikiran pemilih perempuan yang mendominasi memimpin ialah laki-laki.
3. Pemilih perempuan merasa kurang layak dan kurang yakin bila calon legislatif perempuan memimpin.
4. Masih tingginya pembagian peran serta tanggung jawab calon legislatif perempuan yang dijalani calon legislatif perempuan.
5. Pemilih perempuan menilai calon legislatif perempuan menggunakan emosional dalam mengambil kebijakan dibanding secara rasional atau logika.

Sehingga dalam orientasi pemilih perempuan terhadap calon legislatif perempuan di Dapil VI pada pemilihan umum DPRD Kota Pekanbaru tahun 2019 belum optimal berjalan di tempat tersebut dengan hasil tidak

adanya keterwakilan calon legislatif terpilih dari Dapil VI yaitu di Kecamatan Senapelan dan Payung Sekaki.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan masalah-masalah yang di temukan, peneliti memberi beberapa saran yang diharapkan dapat memberi masukan kepada peneliti yang akan datang tentang orientasi pemilih perempuan terhadap calon legislatif perempuan di Dapil VI pada pemilihan umum DPRD Kota Pekanbaru Tahun 2019 yaitu :

1. Memberikan edukasi kepada pemilih khususnya pemilih perempuan tentang betapa pentingnya keterwakilan perempuan di legislatif yang dapat membantu tercapainya kesetaraan gender dan keterwakilan perempuan di legislatif.
2. Bagi peneliti, untuk dapat melanjutkan pengenalan orientasi calon legislatif perempuan, sehingga pada akhirnya akan dapat terlihat hasil yang diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

Adman Nursal. 2004. *Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu*, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka. Jakarta.
Firmanzah. 2008, *Mengelola Partai Politik*, Jakarta. Yayasan Obor Indonesia. Gabriel Almond dan Sidney

Verba, 1984, *Op.Cit.*, hlm. 16

Joko J. Prihatmoko, 2005, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta

Nasution, M.A. Dr. Muhammad Iqbal, M.Ag. dan Drs. H. Amin Husein. 2010. *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontenporer*. PT Fajar Interpratama Mandiri. Jakarta

Rahman H.I. 2007, *Sistem Politik Indonesia*, Graha Ilmu, Jakarta.

Sumber lain:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

UU Pemilu Tahun 2003 Pasal 65 Ayat 1 Mengenai Kuota Minimal 30% calon legislatif perempuan.

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor : 59/HK/03.1.Kpt/1471/KPU-Kota/IX/2018 tanggal : 20 September 2018 (diakses pada 27 maret 2020)

Skripsi:

Eric Handoko. 2017. Perilaku Pemilih Pemula di Kecamatan Rengat Barat pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2015. Ilmu Pemerintahan. Universitas Riau

Sri Wulandari. 2017. Perilaku Tidak Memilih Dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014 (studi kasus Kecamatan Pekanbaru Kota). Ilmu Pemerintahan. Universitas Riau

Zikra Putri Irmalinda. 2019. Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten Tanah Datar Periode 2014-2019. Ilmu Pemerintahan. Universitas Riau

Jurnal

Analisis Peran Perempuan Dalam Partai Politik Di Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDIP) Kota Cirebon Oleh Yogi Maulana Malik

Budaya Patriarki dan Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik 2017 Oleh Fredik Lambertus Kollo

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Tingkat Partisipasi Politik Perempuan Pada Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Mojokerto 2014 Oleh Totok Inwantoro

Faktor Pendong Keterpilihan Calon Legislatif Perempuan Di Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Kudus 2014 Oleh Noviya Nailul Misykiyah
Feminisasi Kemiskinan dalam Kultur Patriarki Oleh Ni

Luh Arjani *Memaknai Perempuan Dalam Kursi Parlemen* Oleh V. Hadiyono
Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia Oleh Ade Irma Sakina¹, Dessy Hasanah Siti

Orientasi Politik Pemilih Memilih Nomor Urut 1 Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau Tahun 2014 Oleh Wuwung Ahmadi

Perempuan dan Budaya Patriarki Dalam Politik 2014 Oleh Siti Nimrah dan Sakaria

Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Oleh Yasmuni Anrasdi Putra

Refleksi Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen Perspektif Hak Asasi Manusia Oleh Imam Sukadi

Reformasi Keterwakilan Perempuan di Parlemen Melalui Gayatri Curriculum Program Guna Meningkatkan Daya Saing Perempuan Dalam Ranah Politik Oleh Andi Aulia Nabila¹, Fildanasari², Arham Alfandi³

Rendahnya Keterpilihan Perempuan pada Pemilu 2019 di Bali Oleh Ni Made Ras Amanda Gelgel dan Kadek Dwita Aprian

